**TATA KELOLA DESA WISATA DI DESA NANGAMIRO
KECAMATAN PEKAT KABUPATEN DOMPU**

Ahmad Yani¹

¹Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi, STKIP Bima.

ahmadyani280182@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
Keywords: <i>Tata Kelola, Desa Wisata</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait tata kelolah pariwisata yang telah dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menjelaskan data secara deskriptif, dengan Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian berupa informan penelitian dan selanjutnya didukung oleh data sekunder berupa dokumen data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata di Desa Nangamiro Kecamatan Pekat kabupaten Dompu belum berjalan secara maksimal, ditinjau dari standar tata kelola pariwisata yang baik menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Hal ini dikarenakan pencapaian setiap standar pengelolaan belum sepenuhnya terpenuhi. Faktor-faktor tersebut antara lain keaktifan dan sinergi stakeholders belum sepenuhnya terwujud, kemitraan hanya sampai di tingkat pemerintahan desa dan kemitraan belum dirasakan secara luas serta belum mampu mendorong kepemilikan daerah, program pelatihan yang belum dilaksanakan, masyarakat aspirasi masih umum, promosi masih minim dan berdiri sendiri-sendiri, serta pedoman pemantauan dan evaluasi tempat wisata masih sederhana tanpa ada indikator khusus untuk mengukur dampak kegiatan pariwisata yang dilakukan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang kaya dan subur. Kekayaan alam dan laut melimpah ruah dari Sabang sampai Merauke. Keragaman dan keunikannya serta kekayaan dan keragaman budaya berperan sebagai sumber devisa negara, selain itu juga mempunyai daya tarik dalam sektor pariwisata alam (*ecotourism*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menjelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah (Bab I, Pasal I, Ayat 3). Undang- undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata digariskan bahwa pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha,

meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam kebudayaan bangsa Indonesia. Dalam system pariwisata, ada banyak factor yang berperan dalam mengerakkan system. Aktor tersebut adalah insan-insan pariwisata yang ada pada berbagai sektor. Secara umum, insane pariwisata dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu: (1) masyarakat, (2) swasta, dan (3) pemerintah. Yang termasuk masyarakat adalah masyarakat umum yang ada pada destinasi, sebagai pemilik sah dari berbagai sumberdaya yang merupakan modal pariwisata, seperti kebudayaan. Dimasukkan kedalam kelompok masyarakat ini juga tokoh-tokoh masyarakat, intelektual, LSM, dan media massa. selanjutnya dalam kelompok swasta adalah asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha, sedangkan kelompok pemerintah adalah pada berbagai wilayah administrasi, mulai dari pemerintah pusat, Negara bagian, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya.

Kabupaten Dompu sebagai daerah otonomi memiliki wewenang untuk mengelola beragam objek wisata yang kaya dan berpotensi bagi perkembangan pariwisata khususnya di Kecamatan Pekat yang memungkinkan untuk dikembangkan melalui kerjasama bisnis dan investasi di sektor pariwisata. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 19 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010- 2015 yang menyebutkan bahwa kecamatan Pekat dijadikan kawasan pariwisata dan agribisnis.

Desa Nangamiro Salah Satu desa di pulau Pekat yang Memiliki Potensi Alam yang sangat Strategis yang langsung berbatasan dengan Labuhan Kanangan Kabupaten Bima dan merupakan tempat Wisata yang selalu di kunjungi oleh masyarakat sekitar dan masyarakat luar. Pekat salah satu desa yang menjadi harapan penduduk untuk dijadikan tempat wisata karena memiliki potensi yang sangat besar. Yang terbentang luas tersebut merupakan objek wisata alam yang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemanfaatan sumber daya alam memiliki beberapa makna penggunaan potensi alam local dalam pembangunan desa, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan kelembagaan pengelolaan local dalam Badan Usaha Milik Desa. Dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di kawasan Desa Nangamiro maka berdasarkan Peraturan Desa Nangamiro Nomor 2 Tahun 2017 maka dibentuklah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Nangamiro, yang mana BUM Desa Samakai ini diberi wewenang langsung oleh Kepala Desa untuk mengelola serta mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa Nangamiro, dalam hal ini Masyarakat setempat juga dilibatkan dalam membantu proses pengelolaan dan pengembangan potensi wisata Pantai Nangamiro. Jumlah pengunjung ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Pengunjung Wisata Pantai Nangamiro

No	Tahun	Jumlah Pengunjung (orang)
1.	2019-2020	4.374
2.	2020-2021	4.718
Jumlah		9.092

Sumber. Data Desa Nangamiro Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, 2021

Dalam perkembangannya, pengelolaan wisata desa Nangamiro sudah mulai mendapat perhatian dari masyarakat sekitar dan pemerintah dalam hal pengelolaan pengembangan kepariwisataan. Melihat objek wisata pantai Nangamiro sebagai daya tarik yang ada di Desa Sungai Nangamiro ini perlu adanya proses keberlanjutan pembangunan dan pengembangan wisata sehingga dapat lebih mengundang wisatawan

untuk datang. Penelitian Iqbal et. al., (2021) bahwa pengembangan desa berbasis potensi menjadi urgen karena dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa dalam tata kelola pariwisata di Desa Nangamiro dalam upaya pengelolaan wisata masih terdapat fenomena-fenomena yang muncul dalam proses pertumbuhan produk dan pasar wisatanya. Adapun fenomena-fenomena terkait pelaksanaan tata kelola pariwisata Desa Nangamiro tersebut antara lain: (1) Belum adanya manajemen pengelolaan potensi wisata oleh BUM Desa Samakai sebagai Badan pengelola yang ditunjuk oleh pemerintah Desa Nangamiro dalam pengelolaan objek wisata Di Desa Nangamiro, sebagai acuan kerja jangka menengah dan jangka panjang. Hal ini terjadi disebabkan minimnya pengetahuan dan skill dalam perencanaan pengelolaan objek wisata. (2) Belum optimalnya keterlibatan dari seluruh *Stakeholders* seperti keterlibatan dari pihak pemerintah daerah, pihak swasta/pelaku bisnis dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menjelaskan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis data adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah informan yang memberikan informasi pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat Terkait dalam Tata Kelola Objek Wisata Di Desa Nangamiro

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata pada prinsipnya adalah partisipasi dalam mengelola sumber daya. Oleh karena itu, perlu di rumuskan model yang relevan dalam pelaksanaan program tersebut. Model dipandang sebagai acuan dalam merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi program. Sebagai sebuah pendekatan, model yang dirumuskan harus merepresentasikan partisipasi masyarakat dalam setiap aspeknya.

Peran Pemerintah dalam Partisipasi masyarakat Di Desa Nangamiro

Peneliti menilai adanya partisipasi masyarakat pada objek wisata di Desa Nangamiro telah dimulai sejak pembentukan BUM Desa Nangamiro sebagai pengelola yang di tunjuk langsung oleh pemerintah desa untuk mengelola desa wisata. Berdasarkan anggaran rumah tangga BUM Desa Samakai kewajiban masyarakat desa dalam penyelenggaraan BUM Desa Nangamiro Samakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Ikut serta memajukan unit usaha yang dikelola BUM Desa;
- b) Menghormati hak warga desa lainnya dalam upaya memperoleh pelayanan yang diberikan BUM Desa
- c) Turut serta dalam program atau kegiatan yang dilakukan oleh BUM Desa.

Namun kurangnya partisipasi berupa sumbangan pemikiran mengenai keberlanjutan dalam pengelolaan objek wisata. Apabila ditinjau dari pelaksanaan suatu program pengembangan pariwisata, objek wisata Pantai Ketapang tidak di dukung dengan pengetahuan memadai tentang tata kelola pariwisata. Sedangkan kemampuan untuk berpartisipasi merupakan salah satu unsur pokok yang menentukan tumbuh dan berkembangnya partisipasi.

Partisipasi Masyarakat Desa Nangamiro

Partisipasi masyarakat dalam tata kelola pariwisata Di Desa Nangamiro salah satunya dapat dilihat pada kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam tahap pelaksanaan kegiatan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, seperti kegiatan tahunan acara mandi safar, tahun baru, libur hari raya idul fitri dan idula dha masyarakat selalu dilibatkan. Selanjutnya masyarakat diberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan menikmati hasil- hasil pembangunan Di Pantai Nangamiro. Hal ini terlihat kesempatan masyarakat untuk memanfaatkan usaha-usaha yang sudah di sediakan oleh pemerintah desa dan BUMDesa Desa Nangamiro seperti banana boat, sewa pelampung dan gerai BUMDesa Desa Nangamiro

Peran Swasta dalam Partisipasi Masyarakat

Peran swasta dalam partisipasi masyarakat terkait tata kelola pariwisata di Desa Nangamiro Kabupaten Dompu dalam konteks yang luas dan lebih besar terkait dalam pengelolaan yang melibatkan partisipasi masyarakat belum terlihat Di Desa Nangamiro. Swasta disini yang terlihat hanya pedagang kecil- kecilan yang menjual kebutuhan makanan ringan yang dibutuhkan wisatawan.

Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan

Para pelaku dan pemangku kepentingan hendaknya terlibat secara aktif dan produktif dalam upaya pembangunan kepariwisataan. Pelaku disini meliputi seluruh pihak yang berpengaruh dan berkepentingan serta menerima manfaat dari kegiatan pariwisata. Sesuai dengan paparan teoritis dari Sunaryo tersebut, sehingga dalam tata kelola objek wisata di Desa Nangamiro Kecamatan Pekat, para pemangku kepentingan tentu harus terlibat dalam seluruh proses demi tercapainya tujuan dalam penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik. Keterlibatan segenap pemangku kepentingan Di Desa Nangamiro dapat dilihat sebagai berikut :

a) Keterlibatan Pemerintah

Pemerintah yang terlibat dalam tata kelola Pariwisata Desa Nangamiro adalah pemerintah desa. Sedangkan untuk pemerintah Kabupaten dan Provinsi dari dinas pariwisata belum terlihat terlibat dalam pengelolaan Pulau satonda ini. Pemerintah Desa Nangamiro bersama BUMDesa mengelola Pantai Nangamiro ini agar dapat mendorong ekonomi masyarakat dan akses sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Pengembangan oleh BUMDesa ini sangat penting. Pengelolaan wisata pantai di Desa Nangamiro oleh BUMDesa mengingat banyak sekali peran BUMDesa yang dapat membantu pengembangan wisata supaya bisa bersaing dengan wisata- wisata lainnya. BUMDesa bermanfaat menjadi pintu masuk mengelola potensi pariwisata Desa.

b) Keterlibatan Masyarakat Desa Nangamiro

Keterlibatan masyarakat Desa Nangamiro terlihat dalam kegiatan yang dibuat oleh pemerintah Desa seperti kegiatan rapat tahunan, gotong royong, kebersihan Pantai, perbaikan akses jalan menuju pantai desa nangamiro. Kemudian keterlibatan masyarakat dalam menjalankan usaha yang telah disediakan oleh BUMDesa Samakai diantaranya penyewaan pelampung, karcis tempat masuk dan pengendara banana boat.

c) Keterlibatan Pihak Swasta

Pihak swasta dalam tata kelola Pantai Desa Nangamiro hanya sebatas pedagang yang terlihat disekitar Pantai Ketapang yang menjual minuman dan makanan yang dibutuhkan pengunjung. Namun keterlibatan pihak swasta yang mampu menyediakan keuangan dan tenaga ahli dalam membantu fungsi pemerintah sebagai motor pelaksana pembangunan belum ada terlibat dalam pengelolaan ini.

d) Kemitraan

Kemitraan yang diterapkan dalam tata kelola objek wisata Desa Nangamiro ini harus mempunyai konsep yang jelas dan memberikan manfaat masyarakat sekitar. Kerjasama pemerintah, masyarakat dan swasta menjadi sangat krusial dan dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata tersebut. Dalam hal ini kemitraan yang terjalin di Desa Nangamiro adalah sebagai berikut:

1) Pemerintah

Pemerintah Desa Nangamiro dalam pengelolaan objek wisata Desa Nangamiro, memberi wewenang kepada BUM Desa untuk mengelola sejumlah objek wisata tersebut. Pemerintah Desa memberikan wewenang ini agar BUM Desa Samakai bisa mengelola secara indenpenden dan masyarakat bisa terlibat dan turut aktif mengembangkannya. Aktor yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Pantai Desa Nangamiro ini adalah pemerintah desa bersama BUM Desa Samakai. Sejauh ini hubungan kerjasama pemerintah desa dengan BUM Desa sangat baik. Terlihat pada pengelolaan Pantai Desa Nangamiro, semua kegiatan yang dilakukan BUM Desa tidak terlepas dari pengawasan pemerintah desa. Walaupun BUM Desa diberikan izin dan kewenangan tetapi harus melalui rekomendasi dari pemerintah desa.

2) Swasta

Kemitraan yang ada dalam pengelolaan Pantai Nangamiro bersama swasta belum mampu mendorong munculnya kepemilikan lokal dari berbagai usaha fasilitas penunjang wisata di Pantai Nangamiro. Terbatasnya fasilitas yang ditawarkan pada objek wisata tersebut turut menghambat ketertarikan investor dan pengusaha wisata untuk mengembangkan usahanya di Pantai Nangamiro. Peran pemerintah desa dalam mengembangkan pariwisata tidak lantas hanya terbatas sebagai motivator, namun diperlukan upaya dari pemerintah daerah kabupaten Dompu untuk dapat memfasilitasi para investor dan pengusaha serta masyarakat. Swasta yang masih aktif terlihat di Pantai Nangamiro yang bermitra dalam pengelolaan Pantai hanya sebatas pedagang-pedagang makanan dan minuman ringan. Peran pedagang ini untuk ikut serta berkerjasama dengan pemerintah desa dan masyarakat juga sangat terbatas. Para pedagang hanya mampu berkerjasama dalam hal menjaga kebersihan pantai dan menjaga keamanan Pantai Desa Nangamiro. Terkait kerjasama langsung dalam memajukan pengelolaan Pantai Nangamiro belum terlihat dan dilaksanakan oleh para pedagang. Namun, dari para pedagang ini punya kesadaran diri untuk ikut serta memajukan pengelolaan Pantai Nangamiro bersama pemerintah desa dan masyarakat yang bisa menarik investor lain dalam berkontribusi memajukan pengelolaan Pantai Nangamiro untuk masa yang akan datang.

3) Masyarakat

Pada pengelolaan Pantai Nangamiro tersebut, kurangnya campur tangan pihak swasta dalam membangun fasilitas penunjang kepariwisataan, membuat masyarakat belum mampu menunjang kepemilikan lokal dari usaha yang ada Di Pantai Nangamiro.

Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut

Pada pengelolaan Pantai nangamiro, peran stakeholder dalam pemanfaatan sumber daya secara berlanjut adalah sebagai berikut :

a. Pihak pemerintah dalam Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut

Pada prinsip pemanfaatan sumber daya secara berlanjut, pemerintah desa Nangamiro selalu memperhatikan manfaat yang berkelanjutan. Segala kegiatan selalu dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan Pantai Nangamiro. Hal tersebut terlihat tempat gazebo, mushola, gerai-gerai untuk disewakan, spot-spot foto, dan

kamar mandi selalu dijaga dan dilakukan gotong royong untuk selalu terjaga kebersihannya. Sehingga tempat-tempat yang ada bisa dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama dan bisa memberi kenyamanan bagi pengunjung yang menggunakannya.

Foto: Masyarakat Melakukan Kunjungan Di Pantai Nangamiro Desa Nangamiro Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu (sumber: Google.com)

Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut

Dalam pariwisata Pantai Nangamiro, Masyarakat Desa Nangamiro selalu mengawasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pemerintah desa supaya menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui secara berlebihan. Umumnya pekerja pada wisata Pantai Ketapang berasal dari masyarakat sendiri yang diberdayakan oleh BUM Desa Samakai untuk mengurus sejumlah sarana pariwisata Di Pantai. Dalam mengurus sarana pariwisata yang telah disediakan oleh BUM Desa Samakai seperti gazebo, mushola, gerai untuk disewakan, dan kamar mandi. Masyarakat selalu menjaganya dan membersihkan serta memliharnya agar tetap bersih dan nyaman saat digunakan oleh pengunjung. Selain menjaga kelestarian Pantai Nangamiro, masyarakat juga selalu mengawasi perkembangan pembangunan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa agar selalu menjaga kelestarian lingkungan supaya Pantai.

Monitor dan Evaluasi

Monitoring merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan secara rutin dan secara obyektif digunakan untuk menilai (evaluasi) tingkat kemajuan pada sebuah program/kegiatan. Dengan kegiatan monitoring kita dapat memantau setiap perubahan dengan berfokus pada proses dan keluaran. Tentu dengan melibatkan perhitungan-perhitungan terhadap program yang sedang dijalankan. Melalui monitoring kualitas setiap program atau kegiatan dapat kita nilai untuk kemudian kita tingkatkan pada program selanjutnya atau program di tempat lain. Berbeda dengan monitoring. Evaluasi dilakukan setelah program dilaksanakan dengan menggunakan hasil monitoring sebagai sumber rujukan utama. Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya program kegiatan. Penilaian harus dilakukan seobyektif dan sesistematik mungkin dengan membandingkan realisasi Rangkaian kegiatan masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan

Peran Pemerintah dalam Monitor dan Evaluasi

Pada pengelolaan Pantai Nangamiro monitor dan evaluasi yang mencakup mulai dari kegiatan penyusunan pedoman, pengembangan indikator atau batasan dalam mengukur pelaksanaan monitoring dan evaluasi keseluruhan kegiatan hingga evaluasi dampak kegiatan pariwisata, belum terlaksana dan diselenggarakan oleh pemerintah desa. Evaluasi yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah hanya tergabung dalam rapat tahunan pertanggung jawaban BUM Desa.

Peran Masyarakat dalam Monitor dan Evaluasi

Dalam pengelolaan pariwisata Pantai Nangamiro dalam tahap monitor dan evaluasi masyarakat Desa Nangamiro dalam mengikuti rapat musyawarah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan BUM Desa Samakai hanya beberapa masyarakat yang mengikuti. Sehingga kegiatan monitor dan evaluasi berkaitan dengan pengelolaan pantai ketapang belum optimal terlaksana. Keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan wisata belum sepenuhnya terlaksana. Seharusnya dengan pelibatan masyarakat sejak awal akan lebih menjamin kesesuaian program pengembangan dengan aspirasi masyarakat setempat, kesesuaian dengan kapasitas yang ada, serta menjamin adanya komitmen masyarakat karena adanya rasa memiliki yang kuat. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam evaluasi dan monitoring, sehingga masyarakat yang hadir hanya perwakilan dari RT, RW, Kepala Dusun dan tokoh-tokoh masyarakat. Selebihnya dalam rapat monitoring dan evaluasi hanya dihadiri staf-staf pemerintahan dan pengelola BUM Desa. Kemudian perwakilan masyarakat yang hadir hanya mengikuti rapat musyawarah tersebut tanpa banyak mengeluarkan ide dan pendapat untuk pengelolaan Pantai Nangamiro. Masyarakat yang ada hanya sekedar ikut mendengarkan dan menyetujui apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Kurangnya sosialisasi pemerintah dan kesadaran masyarakat itu sendiri menjadi penghambat pengelolaan pariwisata di Pantai Nangamiro.

Peran Swasta dalam Monitor dan Evaluasi

Peran swasta dalam proses monitor dan evaluasi dalam pengelolaan wisata Pantai Nangamiro belum ada terlibat. Rapat musyawarah tahunan yang diselenggarakan oleh BUM Desa tidak melibatkan dan mengundang pihak swasta. Rapat tersebut hanya melibatkan pemerintah desa sebagai pengawas, masyarakat dan pengelola BUM Desa itu sendiri.

Akuntabilitas Lingkungan

Akuntabilitas yaitu adanya kewajiban bagi aparatur pemerintahan untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kewajiban yang ditetapkan. Perencanaan program pembangunan kepariwisataan harus selalu memberi perhatian yang besar pada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, peningkatan pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat setempat yang tercermin dengan jelas dalam kebijakan, program dan strategi pembangunan kepariwisataan yang ada. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas kinerja yang tinggi serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak di eksplorasi secara berlebihan.

Peran Pemerintah dalam Akuntabilitas Lingkungan

Pada prinsip akuntabilitas lingkungan yang dilakukan pemerintah Desa Nangamiro yaitu dengan cara melestarikan bahkan mengawasi Pantai Ketapang itu sendiri. Namun untuk ketercapaian dari prinsip akuntabilitas lingkungan itu sendiri di pantai Nangamiro ini secara keseluruhan masih belum optimal. Hal ini dikarenakan dalam kaitannya dengan poin kebermanfaatan bagi kualitas manusia dan lingkungan masyarakat, khususnya menyangkut kebermanfaatan sosial dan ekonomi, penyelenggaraan tata kelola Pantai Ketapang masih belum mampu memberikan pengaruh yang besar dan luas untuk masyarakat sekitar. Hal tersebut terhambat oleh belum adanya pondasi yang kokoh dan jaringan kerjasama yang luas dalam penyelenggaraan tata kelola objek wisata tersebut, sehingga aktivitas wisata yang dilakukan di Pantai Nangamiro itu sendiri masih sangat minim. Disamping itu

masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan di Pantai ketapang masih terbatas pada masyarakat tertentu. Dalam hal ini meskipun sudah terdapat organisasi yang mengelola wisata Pantai, namun belum dirasakan kebermanfaatannya bagi masyarakat.

Peran Masyarakat dalam Akuntabilitas Lingkungan

Masyarakat Desa Nangamiro dalam menjaga lingkungan Pantai baik lingkungan fisik, sosial maupun ekonomi dan budaya. Mereka selalu mengedepankan kegotongroyongan dan kebersamaan dalam menjaga destinasi wisata tersebut. Selanjutnya nilai-nilai kebudayaan yang sudah ada dalam masyarakat selalu dipertahankan. Selain menjaga akuntabilitas lingkungan agar tetap terjaga, hal ini sebagai timbal balik bagi wisatawan yang datang dengan pelayanan yang baik juga dari masyarakat.

Peran Swasta dalam Akuntabilitas Lingkungan

Pada tata kelola pariwisata Di pantai Nangamiro, pihak swasta yang terkait yaitu pelaku usaha selalu memperhatikan keberlanjutan lingkungan wisata tersebut. Hal ini dibuktikan dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan Pantai tersebut.

Pelatihan pada Masyarakat

Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut selalu membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan dan ketrampilan serta meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat sebagai sumber daya yang potensial. Pelatihan sebaiknya diarahkan pada topik-topik pelatihan yang berkaitan dengan wawasan keberlanjutan pembangunan kepariwisataan. Prinsip pelatihan pada masyarakat terkait dalam *Good Tourism Governance* dapat diukur dengan melihat ada atau tidaknya program pendidikan dan pelatihan masyarakat terkait kepariwisataan.

Peran Pemerintah dalam Pelatihan Masyarakat

Secara keseluruhan prinsip pelatihan terhadap masyarakat terkait kepariwisataan tidak terlihat telah diselenggarakan pada objek wisata Pantai Nangamiro di Desa Nangamiro. Pemerintah daerah yang dalam hal ini merujuk pada Dinas Pariwisata Kabupaten Dompu belum menerapkan program pelatihan bagi masyarakat terkait, pelatihan kepariwisataan hanya pernah diberikan kepada pemerintah desa bentuk seminar ataupun *workshop* dan bukan kepadamasyarakat Desa Nangamiro.

Peran Masyarakat dalam Pelatihan Pariwisata

Pelatihan masyarakat pada desa yang mempunyai potensi wisata sangat diperlukan guna menunjang manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat dilingkungan wisata itu sendiri. Pelatihan pariwisata terhadap masyarakat dimaksudkan untuk Pihak Swasta Swasta dalam mempromosikan objek wisata yaitu para pedagang yang menjual kaos-kaos yang bertemakan Pantai Ketapang. Hal ini bertujuan semakin banyak kaos-kaos dengan tema Pantai Ketapang terjual, sehingga semakin luas ketertarikan orang yang penasaran dengan wisata tersebut. Selain sebagai cendera mata untuk dibawa pulang, kaos-kaos yang dijual pedagang dengan tema pantai ketapang menarik minat masyarakat untuk selalu berkunjung ke Desa Nangamiro.

KESIMPULAN

Prinsip *tata kelola kepariwisataan yang baik* dalam pengelolaan objek wisata Pantai Nangamiro di Desa Nangamiro sudah diterapkan, namun penerapannya masih belum optimal. Hal ini dikarenakan ketercapaian masing-masing prinsip dalam *tata keola kepariwisataan yang baik* belum seluruhnya terpenuhi. Adapun penyelenggaraan tata kelola objek wisata di Desa Nangamiro diukur berdasarkan prinsip *tata keola*

kepariwisataan yang baik penerapannya masih belum optimal yaitu yang pertama dalam prinsip partisipasi masyarakat terkait, hanya masyarakat tertentu yang aktif berpartisipasi dan partisipasinya masih tergolong dalam pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah desa belum terkait partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan. Kedua prinsip keterlibatan pemangku kepentingan, pihak pemerintah dan masyarakat belum mampu menarik investor pihak swasta dalam pengelolaan Pantai Nangamiro.

Prinsip yang ketiga kemitraan hanya sampai ketingkat pemerintah desa dan kemitraannya belum dirasakan secara luas dan belum mampu mendorong kepemilikan local. Keempat pemanfaatan sumber daya secara berlanju masih dilaksanakan dalam tahap yang sederhana dalam mencengah pemanfaatan sumber daya yang berlebihan. Kelima pedoman *monitoring* dan evaluasi objek wisata masih sederhana tanpa ada indicator khusus guna mengukur dampak dari kegiatan wisata yang dilakukan. Keenam akuntabilitas lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta yaitu menjaga lingkungan Desa Nangamiro agar tetap terjaga keasriannya. Ketujuh mengakomodasikan aspirasi masyarakat, aspirasi masyarakat yang masih bersifat umum dan yang terakhir promosi dan advokasi nilai budaya Nggusuwaru masih minim dan berdiri sendiri-sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, Janianton. 2015. *Membangun Pariwisata dari Bawah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Herry. 2016. *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Iqbal, M., Agussalim, A., & Suaeb, S. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Petani Jagung Di Kecamatan Parado Dengan Pendekatan Agroforestri. *Jurnal PenKomi (Kajian Pendidikan dan Ekonomi)*, 4(2), 86-93.
- Irawan, Nata. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka OborIndonesia.
- Kaelan, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma. Kamaroesid.
- Muljadi A.J. 2014. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Pitana , I Gde & Diarta, I Ketut Surya. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Pitana, I Gde. 2015. *Sosiologi Pariwisata (Kajian sosiologis terhadap struktur, system, dan dampak-dampak pariwisata)*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 19 Tahun 2011 tentang RPJM
- Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang BUMDesa
- Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2017 tentang Peraturan Badan Usaha Milik Desa Cingam jaya.
- Sabarguna, Boy S. *Analisis data pada penelitian kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2016. *Membangun Indonesia dari Desa*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

- Sutoro, Eko, Dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaruan Desa (Fppd).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan
- Zakaria, Gusman. 2017. *Revolusi Mental*. Jakarta: Gramedia.